

## Implementasi Pancasila untuk Mencegah Isu Radikalisme dalam Bingkai Kebhinekaan

Muhammad Muqorrobin<sup>1</sup> & Slamet Widodo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STKIP Al-Hikmah Surabaya

e-mail: mmuqorrobin18@gmail.com<sup>1</sup> & slamet.10050@gmail.com<sup>2</sup>

Received: 10 Mei 2022

Accepted: 10 Juni 2022

Final proof: 25 Juni 2022

### Abstrak

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya, bahasa, suku, ras, adat dan agama. Keragaman budaya bangsa Indonesia dapat memicu konflik serta berpotensi memunculkan beragam pemahaman dan gerakan radikal, baik yang mengatasnamakan agama, suku, dan golongan. Namun, pada kenyataannya gerakan radikalisme muncul tidak hanya diakibatkan oleh perbedaan SARA, tetapi juga terdapat faktor dimensi global, politik, serta kesenjangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam upaya mencegah penyebaran paham serta gerakan radikalisme di Indonesia. Metode dari penulisan artikel ini dengan menggunakan metode studi pustaka kajian literature. Pada saat ini implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat semakin memudar, hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang makna dan arti dari nilai-nilai Pancasila. Diperlukan tindakan atau upaya secara bersama dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencegah penyebaran paham serta gerakan radikalisme guna menjaga keutuhan bangsa Indonesia dengan persatuan dan kesatuan.

**Kata Kunci:** Bangsa, Indonesia, Implementasi, Pancasila, Radikalisme

### Abstract

The Indonesian nation is a pluralistic nation that has various cultural, linguistic, ethnic, racial, customary and religious diversity. The cultural diversity of the Indonesian nation can trigger conflict and has the potential to give rise to various radical understandings and movements, both in the name of religion, ethnicity, and class. However, in reality the radicalism movement emerged not only due to racial differences, but also global, political, and social disparities in society. The purpose of this paper is to analyze how the implementation of Pancasila values in an effort to prevent the spread of radicalism and radicalism in Indonesia. The method of writing this article is by using the literature review method. At this time the implementation of Pancasila values in people's lives is fading, this is caused by a lack of awareness and understanding of the community about the meaning and significance of Pancasila values. Joint actions or efforts are needed in implementing Pancasila values in the life of society, nation and state in preventing the spread of radicalism and understanding movements in order to maintain the integrity of the Indonesian nation with unity and integrity.

**Keywords:** Nation, Indonesia, Implementation, Pancasila, Radicalism

## PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan. Dalam era globalisasi, romantisme kesamaan historis jaman lalu tidak lagi merupakan pengikat rasa kebersamaan yang kokoh. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya, bahasa, suku, ras, adat dan agama. Di mana pada setiap daerah memiliki perbedaan serta ciri khasnya masing-masing. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang padat dengan wilayah yang luas serta melimpahnya kekayaan sumber daya alam. Hal tersebut dapat menjadi kekuatan ataupun bahkan dapat menjadi tantangan serta ancaman bagi Bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang besar memiliki berbagai tantangan yang besar yaitu adanya semangat primordialisme yang sempit, oleh karena itu aksi kekerasan seringkali muncul dan menggunakan nama agama tentu saja cukup bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Isu lama yang kerap muncul ke permukaan yaitu keinginan beberapa kelompok yang ingin menegakkan kembali syariat islam dan khilafah islamiyah sebagai hukum negara, padahal kontroversi soal negara islam secara ideologi politik maupun sebagai sebuah dasar negara mendapat penolakan dan resistensi oleh semua elemen bangsa. Perumusan ideologi Pancasila yang digagas oleh founding father telah menetapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang telah diterima oleh semua golongan dan semua kelompok kepentingan karena Pancasila mempunyai kemampuan untuk mempersatukan masyarakat yang plural yang memiliki potensi besar dalam konflik dan perpecahan. Bagi negara-negara maju ideologi bukanlah masalah yang perlu di pertimbangkan, berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia implementasi ideologi Pancasila seringkali menjadi persoalan bangsa.

Namun perbedaan tersebut bukanlah sebagai penghalang untuk menyatukan berbagai perbedaan, yang diikat dengan pancasila sebagai pemersatu Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi, pilar, serta landasan Bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Nilai-nilai yang tertuang ke dalam setiap silanya adalah sebagai identitas negara, baik dalam tatanannya serta untuk mencapai tujuan nasional : (1). Ketuhanan Yang Maha Esa, (2). Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3). Persatuan Indonesia, (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rani, 2017.), dan tercantum pada alinea ke-4 (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan nilai-nilai pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, jauh sebelum pancasila dirumuskan dan diresmikan sebagai dasar negara (Anas, 2019). Hal tersebut tercermin sebagai penerapan nilai-nilai religius, gotong-royong, toleransi, musyawarah, dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat nusantara.

Sebagai negara pluralitas, berbagai permasalahan serta konflik memang tidak dapat dihindarkan. Keberagaman latar belakang sosial-budaya dan agama dapat menjadi faktor yang sangat krusial dalam munculnya gerakan radikalisme. Disamping itu, berbagai Keragaman ini juga dapat memunculkan sifat intoleransi yang mengatasnamakan segala kepentingan. Maraknya permasalahan atau kasus kekerasan yang didasari atas nama SARA, merupakan bibit munculnya aksi radikal di Indonesia. Dengan mengatasnamakan hal tersebut, seseorang dapat melakukan aksi radikal dengan membunuh, mengancam, melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Dengan dalih “menegakkan kebenaran dan keadilan” dalam bentuk

tindakan yang menyimpang seperti berupa bom bunuh diri, atau tindakan lainnya yang bertentangan. Seperti juga pada ranah internasional, gerakan radikal yang mengatasnamakan agama begitu mudah untuk diidentifikasi, misalnya konflik terkait penganut Sunni dengan Syiah, penganiayaan warga rohingya oleh penganut agama Budha, aksi deskriminatif penganut protestan ke ada minoritas muslim di Amerika, serta massifnya gerakan ISIS (Islamic State of Irak and Suriah) yang keberadaannya mengancam nilai-nilai Pancasila (Sudjito and Muhaimin 2018). Di Indonesia sendiri juga telah muncul gerakan radikalisme di masyarakat sebagai aksi terorisme sejak era reformasi hingga saat ini. Seperti munculnya kelompok dengan atribut dan isu bangkitnya PKI (PKI telah berusaha melakukan kudeta kepada NKRI pada tahun 1948 dan 1965), gerakan bervisi pendirian khilafah (HTI), serta munculnya gerakan ISIS di Indonesia (Satriawan,dkk 19). Persoalan tersebut mengacu pada paham radikalisme yang ingin merubah tatanan serta ideologi bangsa Indonesia. Radikal sendiri sangat erat kaitannya dengan kekerasan serta tidak adanya toleransi terhadap siapa saja yang tidak memiliki paham yang sama. Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan besar yang mengancam keutuhan bangsa, di mana pemikiran-pemikiran radikal dapat memecah belah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia.

Maraknya praktek radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bermula dari benih-benih pemikiran dan tindakan intoleran yang menghinggapi sebagian kecil kelompok masyarakat di Indonesia. Munculnya gerakan radikalisme berawal pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya kran demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok islam radikal. Fenomena radikalisme di kalangan umat islam seringkali disandarkan dengan paham keagamaan, sekalipun pencetus radikalisme bisa lahir dari berbagai hal apakah ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radikalisme islam telah makin membesar karena pendukungnya juga semakin meningkat. Akan tetapi, kadangkala gerakan ini berbeda pangana serta tujuan, sehingga tidak memiliki pola yang seragam. Ada juga yang hanya sekedar memperjuangkan implementasi syariat islam tanpa keharusan mendirikan “Negara islam”, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya “Negara islam Indonesia”, tergantung sudut pandang penganutnya. Intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya menjangkiti sebagian kecil ormas keagamaan, namun juga telah menjadi “virus” yang menyerang pemuda, remaja, siswa, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia. Intoleransi telah terlanjur menyebar bak penyakit di kalangan dunia pendidikan, baik sekolah dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Sebagai contoh kecil, bukankah di sebagian lingkungan SMA, sadar atau tidak sadar, untuk memilih Ketua OSIS cenderung dari agama mayoritas siswa SMA tersebut?. Ditambah lagi dengan memilih pemimpin diarahkan yang seagama, pendirian rumah ibadah yang sulit, dan menghalangi orang untuk beribadah. Itu semua contoh intoleransi, yang sangat membahayakan, karena akan mendorong perilaku radikalisme, yang menyebabkan aksi terorisme.

Sebagai bangsa yang telah memiliki konsensus dasar nasional, sering disebut dengan “empat pilar kebangsaan”, Indonesia harus tetap memegang teguh Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia sebagai perekat bangsa, fondasi negara, dan ideologi negara. Keistimewaan Indonesia dari bangsa-bangsa lain adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila, yang itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, dimana hanya Indonesia pemilik Pancasila, dan itulah keistimewaan dan keunikan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. setiap upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain selain Pancasila adalah perbuatan

yang mengingkari terbentuknya Indonesia sebagai negara bangsa, dan untuk itu harus disingkirkan dari bumi Indonesia.

Pasca era reformasi hingga saat ini telah terjadi 65 kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, di akhir tahun 2019 aksi radikalisme dalam bentuk penusukan yang mengatasnamakan agama terjadi di Pandeglang, Banten. Pelaku diidentifikasi terpapar paham radikal ISIS sehingga melakukan aksi penusukan kepada pejabat negara dan menjadikan agama sebagai alasan tindakan tersebut. Selanjutnya aksi bom bunuh diri dan mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan jihad fisisabilillah yang dilakukan oleh sekelompok orang di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Tindakan seperti ini perlu diawasi dan ditelusuri lebih lanjut agar dapat diberantas hingga keakarnya, ajaran agama Islam dan agama lainnya tidak pernah mengajarkan kepada pengikutnya untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun begitu juga dengan Pancasila. Lima nilai dalam Pancasila mengandung nilai-nilai kebaikan yang memegang teguh persatuan dalam keberagaman sehingga dapat terjaga dari paham-paham radikal. Indikasi tindakan tersebut merupakan akibat dari pemahaman agama yang sempit serta minimnya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila sehingga menjadikan seseorang gampang terpengaruh oleh paham-paham radikalisme, terutama radikalisme yang mengatasnamakan agama

Fenomena tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama semakin meresahkan masyarakat, lebih lanjut tindakan ini membuat aparat keamanan dan penegak hukum dituntut lebih sigap dalam mengantisipasi penyebaran, ancaman dan tindakan paham radikalisme agama yang semakin menyebar luas sehingga menjadikan bangsa ini kehilangan praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menimbulkan masalah besar yang berkelanjutan karena penyebaran paham-paham radikal terus berkembang secara pesat, realita ini harus dihadapi dengan tegas untuk menekan penyebaran paham-paham radikal. Pada penulisan ini peneliti menemukan 3 (tiga) penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan kemiripan dengan penelitian ini, penelitian pertama yaitu membahas tentang pencegahan gerakan radikalisme yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila, orisinalitas dalam penulisan ini yaitu penanaman ideologi Pancasila dengan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk menekan paham-paham radikal. Penelitian kedua yaitu melihat latar belakang radikalisme dari sosial, aktor dan organisasi, orisinalitas dalam penelitian ini adalah melihat tata cara dan metode penyebaran paham-paham radikal yang begitu pesat. Penelitian ketiga yaitu menghambat perkembangan paham radikal sejak dini, orisinalitasnya yaitu menganalisa perkembangan paham-paham radikalisme dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menekan tindakan radikalisme agama.

Radikalisme agama merupakan hal tidak bisa di sepelekan oleh bangsa Indonesia. Radikalisme adalah paham atau gerakan yang menginginkan pembaharuan dengan mengembalikan diri mereka ke "akar" secara ekstrem. Pandangan ini kerap disandingkan dengan gerakan fundamentalisme. Gerakan radikal biasanya dicapai dengan segala cara, mulai dari cara yang halus sampai cara yang keras sekalipun. Nama : Didi Cahyono NPM : 162878 Realitas radikalisme agama di Indonesia kian hari kian menggelisahkan, khususnya pasca reformasi. Radikalisme agama ditampilkan dalam tindakan dishumanis (tak manusiawi) yang memilukan, seperti Bom Bali, tragedy Poso, Ambon, Sambas, Tolikara, Penyerangan di Gereja St. Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta, Minggu (11/02/2018), yang menyebabkan setidaknya empat orang terluka akibat sabetan senjata tajam, Ledakan bom bunuh diri terjadi di kawasan Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya yang terjadi, Minggu (13/5/2018) pukul 07.00 WIB, dst. Segala apa yang jahat

seperti tindakan membunuh, menteror, membakar, memusnahkan sesama manusia itu anehnya dibingkai atas nama agama. Hal yang memilukan lagi adalah bahwa ternyata para tokoh, pelaksana, eksponen, pelaku kekerasan itu adalah orang-orang yang mengaku beragama. Pertanyaan yang muncul adalah : Apakah agama mengajarkan orang menjadi radikal dan tega menyakiti? Apakah artinya agama jika tidak melestarikan kehidupan manusia? Apakah agama untuk memusnahkan kehidupan manusia? Masih terekam dengan jelas bagaimana mencekamnya peristiwa peledakan bom yang dibingkai oleh motivasi agama. Di berbagai media diutarakan berbagai wawancara dan tayangan yang berisi alasan mengapa terror bom dilakukan. Motivasi yang amat kentara adalah alasan agamis

Oleh karena itu diperlukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah berkembangnya tindakan radikalisme dalam menjaga kutuhan bangsa Indonesia dengan persatuan dan kesatuan menyatukan berbagai macam perbedaan.

## **METODE**

Dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris.

Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal, sehingga dapat dijangkau dengan oleh penalaran manusia. Empiris, berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Sistematis, berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, obyektif. Dikatakan valid, yaitu menunjukkan derajat ketepatan/kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah penelitian sering sulit dilakukan, maka dari itu data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya, dilakukan pengujian realibilitas dan obyektivitas. Data yang reliabel dan obyektif, biasanya akan valid. Sebaliknya data yang valid pasti reliabel dan obyektif.

Dalam penelitian artikel ini menggunakan metode studi pustaka, yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Proses studi kepustakaan dinilai sebagai tindakan mengumpulkan sejumlah data. Data inilah yang nantinya dipakai penulis untuk ditambahkan atau dicantumkan ke dalam tulisannya. Sehingga apa yang ditulis bukan berupa karangan melainkan ada data valid atau data yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini data yang diambil berasal dari artikel atau pustaka yang memiliki kredibilitas yang baik dan relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Kondisi Intoleran Di Indonesia**

Berdasarkan data yang selama ini dilakukan oleh berbagai lembaga survei, pusat kajian, dan universitas, terdapat semakin maraknya kasus-kasus intoleransi di tengah masyarakat Indonesia. Intoleransi adalah suatu sikap, pandangan, dan perilaku yang tidak menerima perbedaan orang lain, kelompok lain, atau komunitas

lain, sehingga memandang sesuatu yang berbeda darinya dianggap salah, haram, dan harus dimusuhi, diperangi, dan dimusnahkan (Projo Prastowo, 2006: 31). Kasus-kasus intoleransi di Indonesia yang sering terjadi misalnya adalah penolakan aktifitas keagamaan umat tertentu, sulitnya perijinan rumah ibadah, terlalu cepat mengkafirkan orang yang tidak seagama dengannya, dan “menghalalkan” darah orang yang tidak seiman dengannya. Ditambah lagi dengan adanya Perda-Perda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang cenderung mendiskreditkan umat tertentu, termasuk membawa politik identitas ke dalam ranah politik, untuk mendulang keuntungan pribadi maupun elit politik tertentu dalam kontestasi politik.

## 2. Kedudukan Pancasila

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi dasar dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari ditengah masyarakat. Kita mungkin bisa melihat bahwa belakangan ini nilai Pancasila mulai pudar karena sedikit demi sedikit orang kurang mengetahui makna dari Pancasila tersebut, di samping itu muncul beberapa faktor radikalisme yang dilakukan oleh sebagian orang untuk mencapai tujuan tertentu tetapi dengan menggunakan cara yang salah dan merugikan orang lain bahkan ada juga yang menggunakan dengan cara kekerasan. Peran Pancasila sungguh diperlukan sebagai upaya menyelesaikan masalah radikalisme yang brutal dan membabi-butu, tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut tidaklah mudah dan sesederhana yang kita pikirkan. Kita membutuhkan kerja keras dan konsistensi yang cukup untuk membumikan kembali ideologi Pancasila dalam menangkal radikalisme. Penanaman nilai-nilai Pancasila harus terus dibumikan dan diterapkan dalam kehidupan. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang harus tertanam dalam pada diri kita sejak dini. Seseorang sudah seharusnya menanamkan dan menghayati nilai-nilai Pancasila mula dari sejak dini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai luhur, budi pekerti, etika dan moral bagi setiap umat manusia di Indonesia dalam rangka merangkai rasa kebangsaan, rasa persatuan, dan kedamaian bukan justru menyebarkan benih kebencian pada Pancasila. Selain itu, perlunya memupuk kembali kecintaan terhadap ideologi Pancasila, kembali pada semangat ideologi Pancasila, melaksanakan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia yang sarat dengan budi pekerti, kearifan, kebijaksanaan dan moralitas harus diimplementasikan oleh setiap organisasi dan setiap keorganisasian agama-agama dan juga di kampus-kampus. Pancasila harus dijadikan pedoman dalam proses berorganisasi sebagai upaya benteng pertahanan untuk mencegah gerakan radikalisme, intoleransi, terorisme. Dengan begitu, Pancasila memiliki relevansi yang sangat tepat sekali saat ini sebagai upaya dalam merangkai rasa kebangsaan, rasa keharmonisan. Karena itu, kita hidup di negara Indonesia harus taat pada hukum dan falsafah bangsa Indonesia yang mengarahkan kita pada kebenaran.

## 3. Implementasi Pancasila

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangkal dan mencegah gerakan radikalisme terorisme adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa Pancasila? Karena Pancasila ini merupakan ideologi dan dasar negara yang bersumber dari kearifan lokal (budaya bangsa) dan mengakomodir keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sangat sarat makna terhadap perdamaian, keadilan dan religiusitas.

## Pembahasan

Menurut Romo Franz Magnis Suseno (2011:116-117), arti Pancasila sangatlah mendasar karena dua hal. Pertama karena kekhasan nasionalisme bangsa Indonesia, dan kedua karena pluralitas (kebhinekaan) bangsa Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia tidak bersifat etnik (tidak hanya satu bahasa seperti Jerman atau satu wilayah seperti Korea) melainkan etnis (memiliki pengalaman yang sama hingga timbul hasrat untuk membangun masa depan). Sementara pluralitas di Indonesia sangatlah besar dan luas. Pluralitas budaya, bahasa, geografis, agama, dan penghayatan terhadap keagamaan. Maka kebangsaan Indonesia jangan pernah diterima begitu saja dalam kehidupan. Tetapi juga perlu dipelihara. Jika hakekat Indonesia adalah plural, maka persatuannya hanya tangguh jika semua pihak ingin bersatu dan bekerjasama. Dan dasar dari pluralisme Indonesia adalah kemampuan untuk menerima dalam perbedaan, menghormati identitas cultural, etnik, dan agama yang ada dalam setiap komponen bangsa. Pancasila harus benar-benar menjadi pandangan dan perilaku hidup sehari-hari bagi setiap orang. Bagaimana nilai-nilai Pancasila terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Pancasila tidak berhenti pada tataran wacana semata saja. Perlu kita ingat setiap sila Pancasila menyiratkan nilai-nilai yang penting untuk sungguh dilihat.

Boelars (2009:147) mencatat bahwa meskipun UUD 1945 sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, masih juga ada juga pihak yang hendak mengganti Pancasila dengan dasar lain. Fait (1988:15) dalam pengantarnya untuk pidato Soekarno di depan BPUPKI berargumentasi bahwa Pancasila adalah usaha keras Soekarno untuk menentang gagasan didirikannya negara agama dan sekaligus mendamaikan perbedaan pendapat Antara kaum nasionalis dan kaum agama. Hal ini tampak dalam pidato Soekarno berikut ini: "Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitiesmito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jika saya peras yang lima menjadi tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 'gotong royong.' Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!" (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:82.)

Sejak awal pembentukan negara ini, banyak terjadi kontroversi tentang bentuk Negara mengenai apakah negara ini didirikan atas dasar agama atau berbentuk negara secular. Setidaknya ada dua golongan besar yang saling berhadapan, yaitu antara kekuatan agamis dan kekuatan nasionalis. "Semua buat semua" serta "tiada egoism agamis," demikian Soekarno berbicara. Darmaputera (1989:291) di titik ini menyimpulkan bahwa Indonesia merdeka 'bukanlah Negara Islam dan bukan Negara secular,' tetapi negara Pancasila. Soekarno memimpikan terwujudnya "Indonesia bagi semua," maka semua warga harus merasa sebagai orang Indonesia dan membangun Indonesia yang sama.

Pancasila terdiri dari lima sila, yang intinya merupakan nilai-nilai universal, yakni: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan. Kelima nilai dalam Pancasila ini merupakan senyawa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menggerakkan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus disosialisasikan dan diajarkan secara terus menerus kepada semua komponen bangsa secara interaktif, dialogis dan menarik, dan harus dihilangkan cara dan metode pembumih Pancasila yang doktiner, monologis dan satu arah.

Oleh karena itu, akan dilihat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat saat ini dan apa yang seharusnya dilakukan agar supaya nilai-nilai Pancasila tersebut dapat menjadi nilai yang praksis, aplikatif, operasional, dan mampu dipahami serta diamalkan secara mudah oleh semua komponen bangsa. Hal ini penting karena Pancasila harus dikebumikan agar tidak terkesan menjadi bahasa dewa-dewa yang sulit membumi. Tugas dari masyarakat Indonesia yang harus membumikan Pancasila menjadi bahasa yang mudah dicerna, tindakan yang kongkret dan contoh yang riil dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

## **SIMPULAN**

Paham bahwa Indonesia adalah bangsa yang multicultural dan ber-Pancasila harus terus disadari dan diperjuangkan bersama. Pemanaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dalam diri dari sejak dini. Sehingga pemahaman terhadap Pancasila sebagai Ideologi bangsa telah melekat pada diri seseorang. Kesatuan bangsa ini dibangun di atas dasar keberagaman budaya, agama, suku, ras dsb. Ancaman mendasar terhadap negara demokratis yang multicultural ini adalah munculnya budaya sektarian. Salah satu perwujudan sektarian adalah sikap antitoleran terhadap "yang lain" itulah pintu menjadi radikal. Keberagaman bangsa ini seharusnya tidak menjadi pemuncu adanya permusuhan. Melainkan mewujudkan hidup dalam damai dan toleransi. Kehadiran Pancasila merupakan sebagai dasar untuk mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia. Radikalisme adalah tindak yang merusak kemanusiaan. Sebagai sesama ciptaan manusia harus menghargai martabat hidup. Memperlakukan sesamanya secara manusiawi, sebagaimana dia memperlakukan dirinya atau mengharapakan orang lain memperlakukannya sama.

Intoleransi, radikalisme, dan terorisme, merupakan ancaman bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, dan falsafah negara. Pancasila sengaja berupaya diganti dengan ideologi lain berbasis agama, NKRI ingin diganti menjadi negara khilafah, dan bhineka tunggal ika ingin dirubah menjadi uniformitas, sehingga semua pihak perlu sikap waspada terhadap sekelompok pihak yang mengarah pada kelompok radikal yang berpotensi mengarah pada aksi teror. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus dilewatkan oleh semua komponen bangsa. Semua pihak harus bertanggungjawab terhadap eksistensi dan penyelamatan Pancasila, dan bukan hanya menjadi tanggungjawab TNI/Polri semata.

Nilai-nilai Pancasila yang didalamnya terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan, harus diajarkan, dipahami, diketahui, dihayati, dijiwai dan diamalkan oleh semua komponen bangsa, khususnya generasi muda penerus bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Program dan kegiatan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila harus menjadi agenda prioritas pemerintah agar diserap dan dijiwai oleh semua komponen bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi penangkal, penangkis, penindak, dan pemulih terhadap degradasi keimanan dan moralitas sekelompok masyarakat yang berperilaku intoleran, radikal, dan melakukan aksi teror.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustinus. "Pancasila dan Multikulturalisme Indonesia." (2018).  
Alfabeta. Subagyo, Agus. (2015). Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi.  
Aziz, Abdul, 'Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme di  
Lembaga Dewantara, Agustinus. "Pancasila dan Multikulturalisme Indonesia."  
(2018).



- Hilmy, Masdar, 'Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru',  
MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 39.2 (2015)
- Kansil. CST. (2006). Modul Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Komunisme di Indonesia: Gerakan Dan Pengkhianatan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Pusat Sejarah TNI, 2009)
- MS. Kaelan. (1996). Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- Mufid, Fathul, 'Radikalisme Islam Dalam Perspektif Epistemologi', Jurnal Addin, 10.1 (2016)
- Pendidikan', HIKMAH Journal of Islamic Studies, XII.1 (2016), 29-56. Djamhari, Saleh As'ad,
- Syarbaini, Syahril. (2003). Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia.
- Srijanti, A. Rahman H.I., Purwanto S.K. (2006). Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, Agus. (2014), Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa Kedokteran. Bandung, Penerbit Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Teguh, Amir. (2020). Implementasi Nilai Pancasila dalam Menekan Radikalisme Agama: Mimbar Keadilan.
- Wisnu Dewantar Agustinus, Diktat Kuliah Ilmu Kewarganegaraan Agama. 2019 Dewantara